RENCANA KERJA

2026

DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN NUNUKAN

KATA PENGANTAR

Atas Rahmat Tuhan Yang Maha Esa dan didorong oleh semangat untuk lebih meningkatkan kualitas kinerja penyelenggaraan pembangunan dibidang lingkungan hidup, maka Rencana Kerja (Renja) Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Nunukan Tahun 2026 ini disusun sebagai salah satu bagian dari substansi perencanaan di Kabupaten Nunukan Dokumen Renja DLH Kabupaten Nunukan Tahun 2026 merupakan penjabaran tahunan dari Renstra DLH Kabupaten Nunukan Tahun 2025 - 2029. Dalam penyusunannya dokumen Renja 2026 hanya berpedoman pada Penetapan RKPD Perubahan Kabupaten Nunukan Tahun 2025, dan memuat isu-isu strategis, kebijakan, program dan kegiatan, serta sub kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun ke depan.

Kami menyadari bahwa dokumen ini masih jauh dari sempurna dan belum sepenuhnya dapat memenuhi harapan, namun telah menjadi komitmen DLH Kabupaten Nunukan untuk melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya dengan tetap mengacu pada dokumen perencanaan yang telah disusun dan ditetapkan.

Akhir kata, semoga Renja DLH Kabupaten Nunukan Tahun 2026 dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya, dan dapat mendorong kita untuk segera mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan.

Nunukan, Oktober 2025

Kepala Dinas Lingkungan Hidup

dr. MEINSTAR TOLOLIU,M.M
NIP. 19661008 199903 1 007

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ---- i

DAFTAR ISI ---- ii

BAB I PENDAHULUAN ---- 1

1.1 LATAR BELAKANG ---- 1

1.2 DASAR HUKUM ---- 3

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN ---- 7

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN ---- 7

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DLH TAHUN LALU ---- 10

2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DLH TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA DLH ---- 10

2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN DLH ---- 16

2.3 ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI DLH ---- 24

2.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AKHIR RKPD ---- 24

2.5 PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT ---- 25

BAB III TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM KEGIATAN ---- 26

3.1 TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL ---- 26

3.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA DLH ---- 27

3.3 PROGRAM DAN KEGIATAN ---- 28

BAB IV PENUTUP ---- 42

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Perencanaan mempunyai peran yang sangat strategis dalam pencapaian tujuan pembangunan suatu wilayah, yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pasal 3 Ayat 1 Undang undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menyebutkan bahwa Perencanaan Pembangunan Nasional mencakup penyelenggaraan perencanaan semua fungsi pemerintahan yang meliputi semua bidang kehidupan secara terpadu dalam Wilayah Negara Republik Indonesia. Pasal tersebut menegaskan bahwa perencanaan pembangunan nasional dibangun secara makro oleh pemerintah pusat untuk menjadi dasar bagi pemerintah daerah.

Oleh karena itu, untuk menjaga keserasian dan tercapainya pemerataan pembangunan dari tingkat pusat hingga daerah, setiap kabupaten/kota diwajibkan melakukan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang untuk jagka waktu 20 tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah untuk jangka waktu 5 tahun, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah untuk jangka waktu 1 tahun, dengan tetap mengacu pada dokumen perencanaan pemerintah di atasnya. Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD) merupakan dokumen perencanaan OPD untuk periode satu tahun. Undang-Undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah telah mewajibkan setiap OPD untuk menyusun Renja OPD sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk menerjemahkan perencanaan strategis lima tahunan yang dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra) OPD kedalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional.

Dalam penyusunan Renja - OPD merujuk Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dan merujuk pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 yang di dalamnya mengatur tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah yang meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dan Rencana Pembangunan Tahunan atau Rencana Kerja Pemerintah (RKP).

Proses penyusunan RKPD DLH Kab. Nunukan adalah bersifat komprehensif melalui pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, *bottom up* dan *top down* dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan pembangunan di Kabupaten Nunukan. Sejalan dengan hal tersebut sesuai dengan UU Nomor 25 tahun 2004 maka proses tersebut diawali dengan membuat dan menyusun rancangan awal RKPD sebagai pedoman penyusunan rancangan Renja SKPD yang merupakan bahan penyusunan rancangan RKPD. Penyusunan rancangan awal RKPD adalah bersamaan dengan proses musyawarah perencanaan pembangunan atau musrenbang tingkat kecamatan sampai dengan pelaksanaan forum SKPD di DLH Kab. Nunukan, atas beberapa pertimbangan tersebut maka disusunlah RKPD rancangan dan sekaligus di follow up sebagai rancangan akhir RKPD DLH Kab. Nunukan. Penyusunan Renja OPD Dinas Lingkungan Hidup Nunukan Tahun 2026 ini mengacu pada visi dan misi Kepala Daerah Terpilih (RPJMD Kabupaten Nunukan 2025 - 2029).

Penyusunan Renja OPD ini sebagai bahan sinkronisasi dan harmonisasi dalam penyusunan RKPD Kabupaten Nunukan Tahun 2026 yang selanjutnya menjadi dasar dalam perumusan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA - PPAS) 2026. KUA - PPAS tahun 2025 ini akan dimintakan persetujuan dari Legislatif (DPRD) Kabupaten Nunukan dan dibuat MOU. Dengan telah ditandatanganinya MOU KUA - PPAS antara Eksekutif (Kepala Daerah) dengan Legislatif (DPRD) akan menjadi dasar bagi setiap OPD untuk menyusun Rencana Kerja Anggaran Organisasi Perangkat Daerah (RKA - OPD) yang selanjutnya akan dituangkan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Nunukan Tahun 2026.

Dokumen Renja OPD disusun dalam basis tahunan. Renja OPD ini merupakan dokumen perencanaan OPD yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun dengan partisipasi dari masyarakat.

Prinsip-prinsip yang dipergunakan dalam penyusunan Renja - OPD tahun 2026 adalah sebagai berikut :

1. Mengacu pada Rancangan RKPD Tahun 2026, yang digunakan sebagai acuan dalam perumusan program, kegiatan, indikator kinerja dan dana indikatif dalam Renja OPD tahun 2025, sesuai dengan rencana program prioritas pada rancangan awal RKPD Tahun 2026.
2. Mengacu pada RPJMD Kabupaten Nunukan Tahun 2025-2029.

3. Untuk memecahkan masalah yang dihadapi, sebagai acuan perumusan tujuan, sasaran, kegiatan, kelompok sasaran, lokasi kegiatan, serta prakiraan maju dalam rancangan Renja OPD serta dapat menjawab berbagi isu isu strategis terkait penyelenggaran tugas dan fungsi OPD.
4. Memasukkan usulan kegiatan hasil musrenbang kelurahan/kecamatan dan pokok-pokok pikiran dewan yang terkait dengan OPD, sebagai acuan perumusan kegiatan dalam rancangan Renja OPD mengakomodir usulan masyarakat yang selaras dengan program prioritas yang tercantum dalam rancangan awal RKPD.
5. Mengakomodir hasil-hasil Focus Group Discussion (FGD) terkait prioritas yang akan dilaksanakan OPD tahun 2026.
6. Substansi rancangan Renja OPD Tahun 2026 memuat :
   a. Program dan kegiatan
   b. Lokasi kegiatan
   c. Indikator kinerja
   d. Kelompok sasaran
   e. Pagu indikatif dan prakiraan maju tahun 2027
7. Penyusunan Renja OPD bukan kegiatan yang berdiri sendiri, melainkan merupakan rangkaian kegiatan yang simultan dengan penyusunan RKPD,serta merupakan bagian dari rangkaian kegiatan penyusunan APBD.
8. Penyusunan program dan kegiatan OPD untuk tahun yang direncanakan mengacu pada ketentuan IKU (Indikator Kinerja Utama) dan SPM (Standar Pelayanan Minimum) dengan mempertimbangkan capaian kinerja SPM yang ada (Jika SPM untuk kegiatan yang dimaksud tersedia).

Dalam penyusunan Renja OPD 2026 ini akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Indikator kinerja dan target kinerja Renja tahun 2026 mengacu pada RPJMD 2025-2029 dan Renstra 2025-2029
2. Mengakomodir hasil-hasil Focus Group Discussion (FGD) terkait prioritas yang akan dilaksanakan OPD tahun 2026.
3. Untuk mendukung akuntabilitas dari program dan kegiatan yang diusulkan dalam Renja OPD akan dilengkapi dengan Pra-RKA dengan mengiplementasikan Analisa Standar Belanja (ASB) Kabupaten Nunukan yang telah ditetapkan.

1.2. DASAR HUKUM

Landasan penyusunan RENJA Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nunukan Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah;
5) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
6) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
7) Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 86);
9) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4698);
10) Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
11) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48);
12) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188);

13) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 333);

14) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah;

15) Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);

16) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

17) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

18) Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Kendal - Semarang - Salatiga Demak - Grobogan, Kawasan Purworejo - Wonosobo - Magelang - Temanggung, dan Kawasan Brebes - Tegal - Pemalang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 224);

19) Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 - 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);

20) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 sebagai pengganti Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

21) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan RPJMD;

22) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

23) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

24) Permendagri Nomor 77 tahun 2020 tentang pedoman teknis pengelolaan keuangan daerah;

25) Peraturan Menteri LHK RI Nomor P.56/MENLHK.SETJEN/2015 tentang Tata Cara dan Persyaratan Teknis Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dari Fasilitas Pelayanan Kesehatan;

26) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.74/Menlhk/Setjen/Kum.I/8/2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Derah Provinsi, dan Kabupaten/Kota yang melaksanakan urusan Pemerintah Bidang Lingkungan Hidup dan urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan;

27) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor P.95/MENLHK/SETJEN/KUM.I/II/2018 tentang Perizinan Pengelolaan Limbah B3 Terintegrasi Dengan Izin Lingkungan Melalui Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;

28) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 04/PRT/M/2017 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik;

29) Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, secara signifikan mengubah struktur dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan penganggaran di daerah;

30) Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 11 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 2 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016-2021;

31) Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelestarian Lingkungan Hidup di Kabupaten Nunukan;

32) Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 19 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2005-2025;

33) Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 19 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Nunukan Tahun 2013 – 2033 (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2013

Nomor 19);

34) Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 13 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2021-2026;

35) Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 10 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Nunukan;

36) Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pengelolaan Sampah;

37) Peraturan Bupati Kabupaten Nunukan Nomor 44 Tahun 2018 tentang Kebijakan dan Strategi Kabupaten Nunukan Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
38) Peraturan Bupati Kabupaten Nunukan Nomor 32 Tahun 2019 tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik;
39) Keputusan Bupati Nunukan Nomor: 184 Tahun 2025 Tentang Pembentukan Tim Pelaksana Penyusunan Rencana Strategis pada Perangkat Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2025-2029

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nunukan Tahun 2026 adalah sebagai dokumen perencanaan pembangunan/pengembangan dan pelaksanaan kegiatan yang dapat memberikan arah kebijakan keuangan, strategi pembangunan, arah kebijakan umum, program pembangunan, sasaran-sasaran strategis dan rencana kerja yang ingin dicapai DLH Kabupaten Nunukan.

Sedangkan tujuan disusunnya Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nunukan Tahun 2026 adalah :

1. Menjadi pedoman dalam melakukan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan pelaporan program kegiatan 1 tahun anggaran.
2. Sebagai tolak ukur indikator kunci keberhasilan dan media akuntabilitas terhadap pelaksanaan program kegiatan yang dilaksanakan.
3. Terwujudnya perencanaan dan pelaksanaan program kegiatan yang dapat dicapai sesuai target dan berorientasi pada hasil

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan Renja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nunukan tahun 2026 sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

1.1 **LATAR BELAKANG**, Mengemukakan gambaran umum tentang Rencana kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nunukan 2026;

1.2 **LANDASAN HUKUM**, Memuat penjelasan tentang Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan DLH serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran DLH;

1.3 **MAKSUD DAN TUJUAN**, Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nunukan Tahun 2026;

1.4 **SISTEMATIKA PENULISAN**, Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nunukan Tahun 2026 serta susunan garis besar isi dokumen;

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DLH TAHUN LALU

2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DLH TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA DLH, memuat kajian terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja DLH tahun lalu (n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Rencana Kerja DLH sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra DLH berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Rencana Kerja DLH tahun-tahun sebelumnya;

2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN DLH, memuat kajian terhadap capaian kinerja pelayanan DLH berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan. Indikator yang dikaji disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing DLH, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan;

2.3 ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI DLH, memuat uraian mengenai sejauh mana tingkat kinerja pelayanan DLH dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan DLH, permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi DLH, dampak capaian visi dan misi kepala daerah terhadap capaian program nasional/internasional seperti SPM dan SDGs, tantangan dan peluang, serta formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas yang direncanakan;

2.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AKHIR RKPD TAHUN 2026, memuat telaahan terhadap rancangan akhir RKPD untuk membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target Renstra DLH dan tingkat kinerja yang dicapai oleh DLH;

2.5 PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT, memuat kajian atas program dan kegiatan yang diusulkan oleh masyarakat yang merupakan bagian dari kegiatan jaring aspirasi terkait kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan terhadap prioritas dan sasaran pelayanan serta kebutuhan pembangunan tahun yang direncanakan sesuai dengan tugas dan fungsi DLH

BAB III TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM KEGIATAN pada bab ini pembahasan dibagi menjadi beberapa pembagian pembahasan, yaitu :

3.1 TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL, memuat telaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi DLH;

3.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA DLH, pada bagian ini, tujuan dan sasaran Rencana Kerja DLH didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi DLH yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra

DLH;

3.3 **PROGRAM DAN KEGIATAN**, pada bagian ini, program dan kegiatan dirumuskan sesuai dengan prioritas dan sasaran pembangunan tahun yang direncanakan berdasarkan tingkat urgensi dan relevansinya yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan untuk memecahkan isu-isu penting terkait penyelenggaraan tugas dan fungsi DLH dalam pembangunan daerah

BAB IV PENUTUP, menguraikan tentang catatan penting yang perlu mendapat perhatian (dalam pelaksanaan maupun dalam kondisi ketidaksesuaian antara ketersediaan anggaran dengan kebutuhan), kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DLH TAHUN LALU

2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DLH TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA DLH

Evaluasi Pelaksanaan Renja DLH Kabupaten Nunukan pada tahun 2026 dilakukan dengan cara :

1. Membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja pada tahun bersangkutan;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun bersangkutan dengan tahun lalu;
3. Membandingkan realisasi kinerja, anggaran dan efesiensi yang telah dilakukan sampai dengan tahun bersangkutan;

Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Renstra PD tahun lalu (n-2 (2024)) mengidentifikasi sejauh mana kemampuan OPD dalam melaksanakan program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh bidang dan UPT sesuai dengan Renstra PD yang telah dilaksanakan. Realisasi Kinerja tersebut, didapatkan berdarkan laporan hasil evaluasi pelaksanaan Renja dan Perubahan Renstra PD tahun 2024. Hasil realisasi capaian Renja dan Renstra PD disajikan pada Tabel 2.1 berikut

:

Tabel 2.1

NO.	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	2024		2025
			TARGET	REALISASI	TARGET
1	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks kualitas Lingkungan Hidup (IKLH	80.34	80,61	80,60
		Indeks Kualitass Air (IKA)	55,12	56,67	55,22
		Indeks Kualitas Udara (IKU)	92,43	95,52	92,54
		Indeks Kualitas Lahan (IKL)	93,48	94,15	94,05
2.	Meningkatnya Tutupan Lahan	Tutupan Lahan	0.76	0.81	0,76
3.	Meningkatnya Pelayanan Pengelolaan Sampah	Persentase Cakupan Pelayanan Persampahan	3,5	5,83	3,5

Tahun 2024 ada 4 (empat) indikator yang memiliki target yang harus dicapai dan realisasinya 4 (empat) idikator yang tercapai (melebihi) target yaitu Indeks kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) yang realisasi capaiannya 80,61 untuk perolehannya dari perhitungan realisasi Indeks Kualitas Air (IKA) dengan nilai capaiannya 56,67, Indeks Kualitas Udara (IKU) dengan nilai capaiannya 95,12, Indeks Kualitas Lahan (IKL) dengan nilai capaian 94,05

Adapun rumus dari IKLH adalah sebagai berikut :

IKLH Kab/Kota = (0.376xIKA) + (0.405xIKU) + (0.219xIKL).

Tutupan Lahan dengan nilai capaiannya 0,81 dan Persentase Cakupan Pelayanan Persampahan dengan nilai capainnya 5,83.

Hasil pengukuran tahun 2024 menunjukkan bahwa seluruh sasaran pada tahun 2024 telah tercapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Faktor pendukungnya adalah penguatan pengawan di bidang lingkungan hidup, dukungan anggaran yang memadai, pemantauan kualtas lingkungan hidup dilakukan secara berkala.

2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Analisis kinerja pelayanan Dinas Lingkungan Hidup berisikan capaian kinerja pelayanan Dinas Lingkungan Hidup berdasarkan Indikator Kinerja Kunci (IKK) di Bidang Lingkungan Hidup. Hasil analisis kinerja pelayanan DLH disajikan dalam tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup terlampir di bawah ini

Tabel 2.2

Pencapaian Kinerja Pelayanan DLH Tahun 2024

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke					Realisasi Capaian Tahun ke				
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Indeks Kualitas Air (IKA)	-	-	54,92	55,02	55,12	-	65,71	54,52	51,88	56,67
2	Indeks Kualitas Udara (IKU)	-	-	92,21	92,32	92,43	-	95,55	96,3	95,12	95,52
3	Indeks Kualitas Lahan (IKL)	-	-	92,34	92,91	93,48	-	92,81	93,93	94,03	94,15
4	Status Kualitas Lingkungan Hidup	-	-	Tercemar ringan	Tercemar ringan	Tercemar ringan	-	Tercemar ringan	Tercemar ringan	Tercemar ringan	Tercemar ringan
5	Ketaatan penangung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PLH dan PUU LHyang diterbitkan oleh pemerintah daerah	n/a	n/a	16,67%	15,38%	14,29%	n/a	18,18%	22,22%	36,36%	20,00%
	Persentase penanganan pengaduan	n/a	n/a	100%	100%	100%	n/a	n/a	100%	100%	100%
6	Tutupan Lahan	-	-	0,75	0,75	0,76	0,76	0,75	0,78	0,8	0,81
7	Cakupan Pelayanan Persampahan	-	-	3,2	3,2	3,5	-	-	5,42	5,83	5,83
9	Persentase nilai hasil evaluasi SAKIP										
	Terwujudnya pelayanan admisitrasi perkantoran yang berkualitas										

Tabel 2.3

Realisasi Anggaran DLH Tahun 2025 Triwulan III

No	Sasaran	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (sub-output)	Target Akhir Renstra Tahun RPJM/Renstra (2021-2026)		Realisasi Capaian Kinerja Renja sampai dengan Tahun sebelumnya (2024)		Target Kinerja & Anggaran Renja Tahun yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan (2025)						Realisasi Capaian Kinerja & Anggaran Renja Tahun yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran Tahun yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja & Anggaran RPJM/Renstra s/d Tahun yang dievaluasi (2025)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11 = (9 + 10 + 11 + 12)		12 = (13 / 8 * 100) %		13 = (7 + 13)		14
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K (%)	Rp (%)	K	Rp	
		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																				
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP																				
	1. Terkendalinya pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup	**PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP**	**Persentase dokumen perencanaan yang di susun dan dilaksanakan**	**100 Persentase**	**0**		**52.147.314,00**	**67 Persentase**	**476.342.193,94**		**19.085.847,00**		**22.667.639,00**		**5.870.000,00**		**47.623.486,00**		**10,00 %**		**99.770.800,00**	**DINAS LINGKUNGAN HIDUP**
		Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota																				
1		Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang Telah Mengakomodir RPPLH Kabupaten/Kota	5 Dokumen	773.832.456,00	1 Dokumen	52.147.314,00	1 Dokumen	708.628.256,00	0 Dokumen	19.085.847,00	0 Dokumen	22.667.639,00	0 Dokumen	5.870.000,00	0 Dokumen	47.623.486,00	0,00 %	6,72 %	1 Dokumen	99.770.800,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	1. Terkendalinya pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup	**PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP**	**Persentase pemenuhan terhadap baku mutu lingkungan (air dan udara)**	**69 Persen**	**0**		**668.987.392,00**	**68 Persen**	**653.830.850,55**		**28.570.000,00**		**48.285.000,00**		**35.477.069,00**		**112.332.069,00**		**17,18 %**		**781.319.461,00**	**DINAS LINGKUNGAN HIDUP**
		Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota																				
2		Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	5 Dokumen	486.853.610,00	1 Dokumen	209.343.982,00	1 Dokumen	249.999.510,00	0 Dokumen	28.230.000,00	0 Dokumen	35.503.000,00	0 Dokumen	34.805.069,00	0 Dokumen	98.538.069,00	0,00 %	39,42 %	1 Dokumen	307.882.051,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
3		Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	5 Dokumen	1.618.699.370,00	2 Dokumen	154.708.342,00	1 Dokumen	1.429.999.680,00	0 Dokumen	0	0 Dokumen	7.400.000,00	0 Dokumen	0	0 Dokumen	7.400.000,00	0,00 %	0,52 %	2 Dokumen	162.108.342,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
4		Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota	Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan	5 Dokumen	356.059.680,00	2 Dokumen	291.736.068,00	1 Dokumen	53.340.000,00	0 Dokumen	340.000,00	0 Dokumen	5.382.000,00	0 Dokumen	672.000,00	0 Dokumen	6.394.000,00	0,00 %	11,99 %	2 Dokumen	298.130.068,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
		Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota																				

5		Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan	4 Laporan	39.907.600,00	0 Laporan	0	1 Laporan	21.177.100,00	0 Laporan	0	0 Laporan	0	0 Laporan	0	0 Laporan	0	0,00 %	0,00 %	0 Laporan	0	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
6		Pengisolasian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Jumlah Lokasi Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Diisolasi	2 Lokasi	37.918.750,00	0 Lokasi	0	1 Lokasi	19.612.500,00	0 Lokasi	0	0 Lokasi	0	0 Lokasi	0	0 Lokasi	0	0,00 %	0,00 %	0 Lokasi	0	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
		Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota																			
7		Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran Kewenangan Pemerintah dan/atau Provinsi dan/atau Sektor Lain hingga Terhentinya Sumber Pencemaran yang Dilaksanakan	2 Dokumen	84.748.000,00	1 Dokumen	13.199.000,00	1 Dokumen	39.996.000,00	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0,00 %	0,00 %	1 Dokumen	13.199.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2. Meningkatnya Tutupan Lahan	**PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)**	**Persentase penanganan RTH**	**100 Persen**	**0**		**12.026.425.294,00**	**100 Persen**	**7.024.948.279,00**		**1.451.242.850,00**		**1.751.148.800,00**		**2.113.986.686,00**		**5.316.378.336,00**		**75,68 %**		**17.342.803.630,00**	**DINAS LINGKUNGAN HIDUP**
		Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota																			
8		Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	110 Ha	12.794.015.692,00	415 Ha	8.577.000.800,00	105 Ha	7.974.504.422,00	22,5 Ha	1.017.051.950,00	34,16 Ha	1.312.658.900,00	0 Ha	1.683.862.136,00	56,66 Ha	4.013.572.986,00	53,96 %	50,33 %	471,66 Ha	12.590.573.786,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
9		Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Jumlah Orang yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	0 Orang	50.000.000,00	0 Orang	0	20 Orang	50.000.000,00	0 Orang	0	0 Orang	0	0 Orang	0	0 Orang	0	0,00 %	0,00 %	0 Orang	0	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
10		Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati	Jumlah Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati yang Dikelola	29 Unit	3.598.469.256,00	111 Unit	3.229.134.950,00	28 Unit	1.901.735.856,00	29 Unit	434.190.900,00	0 Unit	427.749.900,00	0 Unit	430.124.550,00	29 Unit	1.292.065.350,00	103,57 %	67,94 %	140 Unit	4.521.200.300,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
11		Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan	Unit Taman Kehati Di Luar Kawasan Hutan yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	3 Unit	420.962.150,00	9 Unit	220.289.544,00	3 Unit	205.000.000,00	0 Unit	0	2 Unit	10.740.000,00	0 Unit	0	2 Unit	10.740.000,00	66,67 %	5,24 %	11 Unit	231.029.544,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	1. Terkendalinya pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup	**PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)**	**Cakupan pengendalian B-3 dan Limbah B-3**	**33 Persentase**	**0**		**37.888.792,00**	**24 Persentase**	**212.596.530,64**		**0**		**0**		**0**		**0**		**0,00 %**		**37.888.792,00**	**DINAS LINGKUNGAN HIDUP**
		Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota																			
12		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi & Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan yang Bukan Menjadi Kewenangan Pemda Kabupaten/Kota serta Pelaksanaan Pengumpulan dan Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Sesuai dengan Kewenangannya	5 Dokumen	154.208.000,00	1 Dokumen	37.888.792,00	1 Dokumen	87.838.000,00	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0,00 %	0,00 %	1 Dokumen	37.888.792,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP

		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)																			
		Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota																			
13		Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan	12 Dokumen	159.380.000,00	98 Dokumen	57.860.472,00	12 Dokumen	89.238.000,00	2 Dokumen	0	4 Dokumen	0	7 Dokumen	2.291.200,00	13 Dokumen	2.291.200,00	108,33 %	2,57 %	111 Dokumen	60.151.672,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
14		Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup	Jumlah PPLHD yang ditingkatkan kapasitasnya	4 Orang	217.356.200,00	7 Orang	106.763.987,00	4 Orang	110.271.000,00	0 Orang	0	0 Orang	0	0 Orang	0	0 Orang	0	0,00 %	0,00 %	0 Orang	106.763.987,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
15		Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi	0 Badan Usaha	357.372.100,00	0 Badan Usaha	0	19 Badan Usaha	357.372.100,00	0 Badan Usaha	0	1 Badan Usaha	110.048.036,00	7 Badan Usaha	152.239.536,00	8 Badan Usaha	262.287.572,00	42,11 %	73,39 %	8 Badan Usaha	262.287.572,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
		PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH																			
		Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH																			
16		Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan, dan Penguatan Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA Terkait dengan PPLH	Jumlah Dokumen Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH yang Dilakukan Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan dan Penguatan	4 Dokumen	103.362.990,00	16 Dokumen	27.317.500,00	2 Dokumen	53.119.990,00	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0,00 %	0,00 %	16 Dokumen	27.317.500,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2. Meningkatnya Tutupan Lahan	**PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT**	**Persentase SDM yang mengikuti pengembangan pelatihan/penyuluhan**	**100 %**	**0**		**52.145.146,00**	**100 %**	**53.149.132,66**		**0**		**0**		**39.066.134,00**		**39.066.134,00**		**73,50 %**		**91.211.280,00**	**DINAS LINGKUNGAN HIDUP**
		Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota																			
17		Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	19 Dokumen	53.428.000,00	5 Dokumen	10.418.000,00	5 Dokumen	28.952.000,00	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	23.255.422,00	0 Dokumen	23.255.422,00	0,00 %	80,32 %	5 Dokumen	33.673.422,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
18		Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan yang terlibat	30 Orang	74.112.640,00	40 Orang	18.156.806,00	25 Orang	49.984.270,00	0 Orang	0	0 Orang	0	0 Orang	9.578.000,00	0 Orang	9.578.000,00	0,00 %	19,16 %	40 Orang	27.734.806,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
19		Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat	Jumlah lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat yang meningkat kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH	2 Lembaga	49.211.640,00	18 Lembaga	23.570.340,00	1 Lembaga	25.150.800,00	0 Lembaga	0	0 Lembaga	0	0 Lembaga	6.232.712,00	0 Lembaga	6.232.712,00	0,00 %	24,78 %	18 Lembaga	29.803.052,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2. Meningkatnya Tutupan	**PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT**	**Persentase penghargaan yang diterima oleh masyarakat**	**100 %**	**0**		**49.943.504,00**	**67 %**	**53.146.499,45**		**0**		**9.895.000,00**		**0**		**9.895.000,00**		**18,62 %**		**59.838.504,00**	**DINAS LINGKUNGAN HIDUP**

	Lahan																				
		Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota																			
20		Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantrophi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH	26 Entitas	105.459.640,00	16 Entitas	49.943.504,00	6 Entitas	52.260.450,00	0 Entitas	0	0 Entitas	9.895.000,00	0 Entitas	0	0 Entitas	9.895.000,00	0,00 %	18,93 %	16 Entitas	59.838.504,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	1. Terkendalinya pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup	**PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP**	**Persentase penanganan pengaduan**	**100 Persentase**	**0**		**39.273.500,00**	**100 Persentase**	**79.345.238,97**		**0**		**0**		**0**		**0**		**0,00 %**		**39.273.500,00**	**DINAS LINGKUNGAN HIDUP**
		Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota																			
21		Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/ditangani	9 Pengaduan	111.257.180,00	3 Pengaduan	39.273.500,00	3 Pengaduan	56.307.630,00	0 Pengaduan	0	0 Pengaduan	0	0 Pengaduan	0	0 Pengaduan	0	0,00 %	0,00 %	3 Pengaduan	39.273.500,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
		PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN																			
		Pengelolaan Sampah																			
22		Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat	4 Kelompok	110.987.875,00	15 Kelompok	45.352.200,00	4 Kelompok	8.115.360,00	0 Kelompok	0	2 Kelompok	0	2 Kelompok	0	2 Kelompok	0	50,00 %	0,00 %	2 Kelompok	45.352.200,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
23		Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	5 Unit	2.882.236.180,00	69 Unit	2.652.780.400,00	1 Unit	119.229.880,00	0 Unit	0	0 Unit	0	1 Unit	0	1 Unit	0	100,00 %	0,00 %	1 Unit	2.652.780.400,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
24		Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah kabupaten/kota	Jumlah dokumen kebijakan dan strategi daerah pengelolaan sampah kabupaten/kota yang disusun dan ditetapkan	0 Dokumen	40.603.160,00	0 Dokumen	0	2 Dokumen	40.603.160,00	0 Dokumen	0	1 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0,00 %	0,00 %	0 Dokumen	0	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
25		Pengurangan sampah melalui pendauran ulang sampah	Jumlah sampah yang terdaur ulang	20 Ton	1.059.591.132,00	5550,23 Ton	791.611.902,00	18 Ton	139.459.360,00	1,5 Ton	0	3 Ton	5.260.000,00	9,1 Ton	13.624.000,00	13,6 Ton	18.884.000,00	75,56 %	13,54 %	5563,83 Ton	810.495.902,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
26		Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	jumlah sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPSTkabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	0 Ton	7.562.295.240,00	0 Ton	0	6811 Ton	7.562.295.240,00	3,66 Ton	1.693.676.600,00	3401,84 Ton	1.729.572.400,00	1516,92 Ton	2.051.290.122,00	4922,42 Ton	5.474.539.122,00	72,27 %	72,39 %	4922,42 Ton	5.474.539.122,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
		NON URUSAN																			
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX																			
	1. Meningkatnyaniali SAKIP perangkat daerah	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Presentase Tingkat capaian Keberhasilan Pelaksanaan tata kelola adminstrasi, Perencanaan,dan Keuangan Peramgkat daerah**	**80 Persen**	**0**		**15.077.559.138,00**	**80 Persen**	**7.124.744.964,55**		**1.974.901.843,00**		**2.472.256.102,00**		**1.693.958.169,00**		**6.141.116.114,00**		**86,19 %**		**21.218.675.252,00**	**DINAS LINGKUNGAN HIDUP**
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																			

27		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	206.505.810,00	5 Dokumen	58.865.321,00	2 Dokumen	176.504.000,00	0 Dokumen	21.410.000,00	0 Dokumen	15.800.000,00	0 Dokumen	2.746.584,00	0 Dokumen	39.956.584,00	0,00 %	22,64 %	5 Dokumen	98.821.905,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
28		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Laporan	52.958.535,00	11 Laporan	36.928.180,00	5 Laporan	34.002.870,00	2 Laporan	0	0 Laporan	0	0 Laporan	1.660.005,00	2 Laporan	1.660.005,00	40,00 %	4,88 %	13 Laporan	38.588.185,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah																			
29		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	37 Orang/bulan	9.717.294.384,00	76 Orang/bulan	9.392.422.600,00	37 Orang/bulan	4.981.097.476,00	37 Orang/bulan	1.490.953.297,00	0 Orang/bulan	1.944.648.822,00	5 Orang/bulan	1.008.054.992,00	5 Orang/bulan	4.443.657.111,00	13,51 %	89,21 %	5 Orang/bulan	13.836.079.711,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
		Administrasi Umum Perangkat Daerah																			
30		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	220.669.290,00	11 Paket	192.616.230,00	6 Paket	99.993.520,00	0 Paket	0	0 Paket	0	0 Paket	28.913.998,00	0 Paket	28.913.998,00	0,00 %	28,92 %	11 Paket	221.530.228,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
31		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	69.212.780,00	17 Paket	64.198.080,00	3 Paket	36.311.820,00	0 Paket	0	0 Paket	0	0 Paket	21.336.714,00	0 Paket	21.336.714,00	0,00 %	58,76 %	17 Paket	85.534.794,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
32		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	14.588.970,00	4 Paket	13.234.530,00	2 Paket	3.999.655,00	0 Paket	0	0 Paket	0	0 Paket	3.846.107,00	0 Paket	3.846.107,00	0,00 %	96,16 %	4 Paket	17.080.637,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
33		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	7 Laporan	439.987.000,00	30 Laporan	468.854.477,00	7 Laporan	229.987.000,00	0 Laporan	0	0 Laporan	46.981.801,00	0 Laporan	43.200.110,00	0 Laporan	90.181.911,00	0,00 %	39,21 %	30 Laporan	559.036.388,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
34		Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	2 Dokumen	11.020.700,00	1 Dokumen	4.972.500,00	1 Dokumen	6.032.400,00	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0,00 %	0,00 %	1 Dokumen	4.972.500,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah																			
35		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	134.665.900,00	2 Unit	49.555.728,00	1 Unit	109.665.900,00	0 Unit	0	0 Unit	0	0 Unit	0	0 Unit	0	0,00 %	0,00 %	2 Unit	49.555.728,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																			
36		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	322.873.000,00	15 Laporan	196.073.217,00	3 Laporan	164.373.000,00	2 Laporan	23.174.946,00	0 Laporan	24.143.264,00	0 Laporan	21.921.866,00	2 Laporan	69.240.076,00	66,67 %	42,12 %	17 Laporan	265.313.293,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
37		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	30 Laporan	1.421.538.296,00	171 Laporan	1.125.424.900,00	30 Laporan	731.098.000,00	30 Laporan	205.206.000,00	0 Laporan	183.336.000,00	0 Laporan	268.988.893,00	30 Laporan	657.530.893,00	100,00 %	89,94 %	201 Laporan	1.782.955.793,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																			
38		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 Unit	3.077.145.600,00	6 Unit	3.459.414.345,00	3 Unit	1.436.403.800,00	3 Unit	p 234.157.600,00	0 Unit	257.346.215,00	0 Unit	p 274.790.500,00	0 Unit	766.294.315,00	0,00 %	53,35 %	0 Unit	4.225.708.660,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
39		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	65.744.500,00	0 Unit	14.999.030,00	3 Unit	35.744.500,00	1 Unit	0	0 Unit	0	0 Unit	18.498.400,00	0 Unit	18.498.400,00	0,00 %	51,75 %	0 Unit	33.497.430,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP

2.3 ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI DLH

Sebagai salah satu instansi di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Nunukan, Dinas Lingkungan Hidup berusaha mewujudkan apa yang menjadi visi dan misi bupati dan wakil bupati terpilih yang kemudian menjadi Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Nunukan melalui RPJMD Kabupaten Nunukan tahun 2025 - 2029

Isu – isu penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi DLH harus diperhatikan dan dikedepankan dalam menyusun Rencana Kerja Tahun 2026, yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan dampak yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintah daerah di masa yang akan dating.

Dari hasil analisis terhadap isu-isu strategis dalam pembangunan Lingkungan Hidup di Kabupaten Nunukan, Isu-Isu penting penyelenggaraan Tugas dan Fungsi DLH adalah sebagai berikut:

No	Capaian Kinerja	Isu Strategis
1	Peningkatan pembangunan dan investasi berbasis SDA berpotensi menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan hidup	Menurunnya Kualitas Lingkungan Hidup
2	Masih rendahnya tingkat kesadaran pelaku usaha dan/atau kegiatan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan	
3	Keterbatasan sarpras digital dan infrastruktur telekomunikasi di daerah pedalaman yang menjadi sentra kegiatan berusaha sektor perkebunan dan pertambangan	
4	Kurangnya kesadaran dan ketaatan pelaku usaha dan/kegiatan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	
5	Tingginya potensi pencemaran air dan kerusakan lingkungan oleh aktifitas pembukaan lahan dan industri dari usaha dan/atau kegiatan serta aktifitas masyarakat di sekitar daerah aliran sungai	Pencemaran tanah, air, dan udara
6	Meningkatnya potensi pencemara udara dari sumber emisi udara bergerak dan tidak bergerak	
7	Berkurangnya luasan RTH karena pembukaan dan alih fungsi lahan oleh aktifitas pembangunan dan kegiatan masyarakat	Bencana Alam (Banjir, Longsor, Kekeringan, dan Abrasi)
8	Meningkatnya timbulan sampah akibat pertambahan jumlah penduduk dan aktifitas rumah tangga dan non rumah tangga	Terbatasanya pelayanan pengelolaan persampahan

2.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AKHIR RKPD

Dengan membandingkan antara rancangan akhir RKPD dengan hasil analisis kebutuhan atas program dan kegiatan Dinas Lingkungan Hidup tahun 2025, maka hasil review terhadap Penetapan RKPD perubahan DLH Tahun 2025 dapat dijelaskan dalam tabel sebagai berikut :

Review terhadap Penetapan RKPD Perubahan DLH Tahun 2025

NO.	PROGRAM	ANGGARAN PERUBAHAN	KETERANGAN
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	8.777.050.481,00	Sumber Pendanaan : Dana Bagi Hasil (DBH)
2	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	627.322.296,00	Sumber Pendanaan : Dana Bagi Hasil (DBH)
3	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	1.844.751.204,00	Sumber Pendanaan : Dana Bagi Hasil (DBH) DBH SDA Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)
4	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	10.258.448.128,00	Sumber Pendanaan : Dana Bagi Hasil (DBH) DBH SDA Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)
5	Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah	4.196.000,00	Sumber Pendanaan : Dana Bagi Hasil (DBH)
6	Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	246.985.240,00	Sumber Pendanaan : Dana Bagi Hasil (DBH)
7	Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal Dan Hak MHA Yang Terkait Dengan PPLH	26.281.640,00	Sumber Pendanaan : Dana Bagi Hasil (DBH)
8	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	66.321.970,00	Sumber Pendanaan : Dana Bagi Hasil (DBH)
9	Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	36.016.600,00	Sumber Pendanaan : Dana Bagi Hasil (DBH)
10	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	16.098.320,00	Sumber Pendanaan : Dana Bagi Hasil (DBH)
11	Program Pengelolaan Persampahan	8.631.459.776,70	Sumber Pendanaan : Dana Bagi Hasil (DBH)
Jumlah		**30.534.931.755,70**	

Sumber data : DLH Kab. Nunukan Tahun 2025

2.5 PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Dari hasil Musrembang di semua Kecamatan di Kabupaten Nunukan tahun 2025 ada usulan yang masuk untuk urusan lingkungan hidup. Dan dari hasil forum OPD yang telah dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup untuk penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2026 usulan yang masuk sudah terakomodir di rencana program dan kegiatan yang ada di Tahun 2026

BAB III
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL DAN PROVINSI

Di dalam RPJMN ini dituangkan langkah-langkah strategis untuk mewujudkan visi Presiden periode 2025-2029, yaitu “Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045”. Langkah-langkah tersebut dikelompokkan ke dalam delapan prioritas nasional pembangunan jangka menengah, yang merupakan implementasi langsung dari delapan misi Presiden atau Asta Cita. Berikut delapan prioritas nasional tersebut:

1. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM);
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru;
3. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi;
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas;
5. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya aiam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri;
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan;
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan;

KLH/BPLH Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran kebijakan sektor dalam RPJMN 2025-2029 dimana pelaksanaannya sesuai dengan tugas dan fungsi Kementerian. Dokumen ini secara substantif menginternalisasi dan mengintegrasikan dokumen rencana pembangunan sektoral yang menjadi pedoman dan komitmen Indonesia di tingkat nasional maupun global dan Sebagaimana tertuang dalam Keputusan Presiden Nomor 182 Tahun 2024 tentang Kementerian Lingkungan Hidup, Peraturan Presiden Nomor 183 Tahun 2024 tentang Badan Pengendalian Lingkungan Hidup, serta Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup/BPLH, bahwa dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan bidang pengendalian lingkungan hidup untuk membantu Presiden, Kementerian LH/BPLH menyelenggarakan fungsi:

1. Perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penataan lingkungan hidup dan sumber daya alam berkelanjutan, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, pengelolaan sampah, limbah dan bahan berbahaya dan beracun, pengendalian perubahan iklim dan tata kelola nilai ekonomi karbon, dan penegakan hukum lingkungan hidup;
2. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan teknis di bidang penataan lingkungan hidup dan sumber daya alam berkelanjutan, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, pengelolaan sampah, limbah dan bahan berbahaya dan beracun, pengendalian perubahan iklim dan tata kelola nilai ekonomi karbon, dan penegakan hukum lingkungan hidup;
3. Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian LH /BPLH;
4. Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian LH/BPLH;
5. Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian LH/BPLH
6. Pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian LH/BPLH

Dalam rangka sinkronisasi sasaran pembangunan dari tingkat pusat dan provinsi, maka dilakukaan penelahaan pada Renstra KLHK dan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Utara, tujuanya adalah agar tidak menyimpang dari koridor sasaran pembangunan yang telah ditetapkan di tingkat Nasional maupun Provinsi.

Penyelarasan ini bertujuan untuk memastikan sinergi kebijakan pembangunan bidang lingkungan hidup antar wilayah di Provinsi Kalimantan Utara, khususnya antara Kabupaten Nunukan dengan Provinasi Kalimantan Utara dan daerah kabupaten/kota lainnya. Melalui sinkronisasi kebijakan, program, dan kegiatan, diharapkan dapat memperkuat peran Kabupaten Nunukan dalam mendukung pencapaian sasaran pembangunan provinsi pada sektor Lingkungan Hidup dan pencapaian prinsip pembangunan berkelanjutan di Provinasi Kalimantan Utara.

3.2. TUJUAN DAN SASARAN RENJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai lembaga teknis daerah, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nunukan membantu Bupati Nunukan dalam melaksanakan urusan Pemerintah Daerah di bidang Lingkungan Hidup. Untuk itu, disusun visi dan misi Dinas Lingkungan Hidup yang akan dicapai melalui pencapaian tujuan dan pelaksanaan kegiatan utama dan kegiatan pendukungnya. Visi pembangunan jangka menengah Kabupaten Nunukan Tahun 2025 - 2029 merupakan penjabaran dari visi Kepala Daerah terpilih serta menjadi dasar perumusan prioritas pembangunan Kabupaen Nunukan. Pernyataan visi Kabupaten Nunukan Tahun 2025 - 2029 Kabupaten Nunukan merupakan gambaran keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan. Berbagai

kebijakan pembangunan jangka menengah dengan Tahun 2026 difokuskan untuk mewujudkan visi. Adapun visi pembangunan jangka menengah Kabupaten Nunukan Tahun 2025-2029 adalah

"**KABUPATEN NUNUKAN YANG INOVATIF, SEJAHTERA, ADIL DAN MANDIRI**"

Dalam mewujudkan Visi Pembangunan Jangka Menengah, maka ditetapkan Misi Pemerintah Kabupaten Nunukan Tahun 2025 - 2029 adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Cerdas, sehat, dan Berkarakter;
2. Peningkatan Dan Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Berbasis Potensi Sumber Daya Lokal;
3. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Transparan, Melayani, Cepat Dan Tuntas;
4. Percepatan Dan Penuntasan Pembangunan Infrastruktur Dasar Yang Adil Dan Merata;
5. Menciptakan Tata Kehidupan Yang Harmoni Dengan Menjaga Dan Melestarikan Nilai -Nilai Budaya Dan Kearifan Lokal

Keterkaitan Visi Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Nunukan Tahun 2021 - 2026 dengan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nunukan ada pada Visi Nyaman Dihuni dengan isu strategis Pengelolaan lingkungan hidup secara berkelanjutan. Sedangkan pada misi yang terkait adalah misi Empat, yaitu : **Percepatan Dan Penuntasan Pembangunan Infrastruktur Dasar Yang Adil Dan Merata**.

Adapun tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam Renja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nunukan tahun 2026 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran DLH Tahun 2026

NSPK	Sasaran RPJMD	Tujuan dan Sasaran	Indikator	Satuan
1	2	3	4	5
Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Indeks
		Terkendalinya pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup	Indeks Kualitas Air (IKA)	Indeks
			Indeks Kualitas Udara (IKU)	Indeks
			Indeks Kualitas Lahan (IKL)	Indeks
		Meningkatnya Kinerja pengelolaan sampah	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS)	Indeks
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Predikat Sakip)	Nilai Sakip	Predikat

Sumber: Renstra DLH Kab. Nunukan 2025-2029

3.3. PROGRAM DAN KEGIATAN

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah. Program/kegiatan DLH tahun 2026 adalah sekumpulan rencana kerja suatu DLH, dimana perumusan program dan kegiatan sesuai dengan prioritas dan sasaran pembangunan tahun yang direncanakan berdasarkan tingkat urgensi dan relevansinya, yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan untuk mencegah isu-isu penting terkait

penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi DLH dalam pembangunan daerah. Adapun rincian Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Pendapatan Daerah Kabupaten Nunukan 2026 dapat dilihat dalam Tabel berikut :

TABEL 3.2

RENCANA KERJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN NUNUKAN
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2026 dan Prakiraan Maju Tahun 2027

NO	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	DINAS LINGKUNGAN HIDUP						**29.478.804.492,84**							**23.361.540.027,90**	
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						**29.478.804.492,84**							**23.361.540.027,90**	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP						**29.478.804.492,84**							**23.361.540.027,90**	
1,	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**9.710.974.566,00**						**-**	**12.225.847.430,81**	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	188.179.510,00			-	Percepatan Pembangu nan Infrastr uktur Pelayanan Dasar	-	-	231.506.870,38	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	135.064.910,00	Kab. Nunukan, Nunukan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Percepatan Pembangu nan Infrastr uktur Pelayanan Dasar	-		176.504.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				5 Laporan	53.114.600,00	Kab. Nunukan, Nunukan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Percepatan Pembangu nan Infrastr uktur Pelayanan Dasar	-		55.002.870,38	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	6.036.041.191,00			-	Percepatan Pembangu nan Infrastr uktur Pelayanan Dasar	-	-	8.311.251.007,79	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				40 Orang/bulan	6.036.041.191,00	Kab. Nunukan, Nunukan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Percepatan Pembangu nan Infrastr uktur Pelayanan Dasar	-		8.340.529.931,26	DINAS LINGKUNGAN HIDUP

	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	372.292.745,00			-	Percepatan Pembangu nan Infrastr uktur Pelayanan Dasar	-	-	444.062.400,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Paket	96.688.450,00	Kab. Nunukan, Nunukan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Percepatan Pembangu nan Infrastr uktur Pelayanan Dasar	-		100.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				3 Paket	54.050.340,00	Kab. Nunukan, Nunukan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Percepatan Pembangu nan Infrastr uktur Pelayanan Dasar	-		60.771.700,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	10.641.025,00	Kab. Nunukan, Nunukan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Percepatan Pembangu nan Infrastr uktur Pelayanan Dasar	-		15.589.700,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				7 Laporan	200.562.000,00	Kab. Nunukan, Nunukan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Percepatan Pembangu nan Infrastr uktur Pelayanan Dasar	-		250.701.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD														
		Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				2 Dokumen	10.350.930,00	Kab. Nunukan, Nunukan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Percepatan Pembangu nan Infrastr uktur Pelayanan Dasar	-		17.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	136.299.280,00			-	Percepatan Pembangu nan Infrastr uktur Pelayanan Dasar	-	-	150.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				1 Unit	136.299.280,00	Kab. Nunukan, Nunukan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Percepatan Pembangu nan Infrastr uktur Pelayanan Dasar	-		150.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	1.116.111.040,00			-	Percepatan Pembangu nan Infrastr uktur Pelayanan Dasar	-	-	1.169.825.163,47	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				3 Laporan	172.200.000,00	Kab. Nunukan, Nunukan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Percepatan Pembangu nan Infrastr uktur Pelayanan Dasar	-		190.508.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				30 Laporan	943.911.040,00	Kab. Nunukan, Nunukan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Percepatan Pembangu nan Infrastr uktur Pelayanan Dasar	-		950.038.240,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP

	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	1.862.050.800,00			-	Percepatan Pembangu nan Infrastr uktur Pelayanan Dasar	-	-	1.948.480.912,64	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				3 Unit	1.606.860.800,00	Kab. Nunukan, Nunukan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Percepatan Pembangu nan Infrastr uktur Pelayanan Dasar	-		1.748.480.912,64	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				3 Unit	255.190.000,00	Kab. Nunukan, Nunukan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Percepatan Pembangu nan Infrastr uktur Pelayanan Dasar	-		200.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2,	**PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP**						**864.420.720,00**						**-**	**810.000.000,00**	
	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	*Tersusunnya naskah akademik penetapan RPPLH Kesesuaian muatan RPPLH dengan KRP*	-			1 Dokumen 1 Dokumen	826.172.720,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Percepatan Pembangu nan Infrastr uktur Pelayanan Dasar	Terkendalinya Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup	-	760.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota														
		Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang Telah Mengakomodir RPPLH Kabupaten/Kota				0 Dokumen	0,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Nunukan, Nunukan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Percepatan Pembangu nan Infrastr uktur Pelayanan Dasar	Terkendalinya Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup		0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota														

		Dokumen RPPLH kabupaten/kota yang di tetapkan				1 Dokumen	0,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Percepatan Pembangunan Infrastruktur Pelayanan Dasar	Terkendalinya Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup		50.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	Peninjauan kembali terhadap RPPLH kabupaten/kota														
		Dokumen RPPLH kabupaten/kota yang dilakukan peninjauan kembali				0 Dokumen	0,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Percepatan Pembangunan Infrastruktur Pelayanan Dasar	Terkendalinya Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup		0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	Penyusunan RPPLH Kabupaten/Kota														
		jumlah dokumen RPPLH di kabupaten/kota yang berisi arahan/muatan RPPLH kabupaten/kota dan mengakomodir arahan RPPLH Provinsi				1 Dokumen	826.172.720,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Percepatan Pembangunan Infrastruktur Pelayanan Dasar	Terkendalinya Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup		710.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP

	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	*Tersusunnya dokumen KLHS Kabupaten Nunukan*	-			1 Dokumen	38.248.000,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Percepatan Pembangunan Infrastruktur Pelayanan Dasar	Terkendalinya Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup	-	50.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD														
		Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang Disusun				0 Dokumen	0,00	Kab. Nunukan, Nunukan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Percepatan Pembangunan Infrastruktur Pelayanan Dasar	Terkendalinya Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup		0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	Penyelenggaraan KLHS Rencana Tata Ruang														
		Jumlah Dokumen KLHS Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota yang Disusun				1 Dokumen	38.248.000,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Percepatan Pembangunan Infrastruktur Pelayanan Dasar	Terkendalinya Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup		50.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	Penyelenggaraan KLHS untuk KRP yang Berpotensi Menimbulkan Dampak/Resiko Lingkungan Hidup														

		Jumlah Dokumen KLHS KRP lainnya yang berpotensi menimbulkan dampak/resiko lingkungan hidup yang disusun				1 Dokumen	0,00	Kab. Nunukan, Nunukan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Percepatan Pembangunan Infrastruktur Pelayanan Dasar	Terkendalinya Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup		0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
3,	**PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP**						**1.194.150.880,00**						**-**	**1.432.908.984,57**	
	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	-	-			-	1.101.336.630,00			-	Percepatan Pembangunan Infrastruktur Pelayanan Dasar	-	-	1.342.908.984,57	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut														
		Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut				0 Dokumen	0,00	Kab. Nunukan, Nunukan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Percepatan Pembangunan Infrastruktur Pelayanan Dasar	-		250.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim														
		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan				1 Dokumen	409.382.880,00	Kab. Nunukan, Nunukan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Percepatan Pembangunan Infrastruktur Pelayanan Dasar	-		410.382.984,57	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut														
		Jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pencegahan pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut yang dilaksanakan				1 Kegiatan	27.207.400,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Percepatan Pembangunan Infrastruktur Pelayanan Dasar	-		0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	Pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan														
		Jumlah pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan yang dilaksanakan				44 Paket	292.525.850,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Percepatan Pembangunan Infrastruktur Pelayanan Dasar	-		302.526.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota														
		Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan				1 Dokumen	372.220.500,00	Kab. Nunukan, Nunukan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Percepatan Pembangunan Infrastruktur Pelayanan Dasar	-		380.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP

	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	-	-			-	51.067.500,00			-	Percepatan Pembangu nan Infrastr uktur Pelayanan Dasar	-	-	50.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup														
		Jumlah Sumber Pencemar dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Dihentikan				1 Titik	51.067.500,00	Kab. Nunukan, Nunukan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Percepatan Pembangu nan Infrastr uktur Pelayanan Dasar	-		50.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	-	-			-	41.746.750,00			-	Percepatan Pembangu nan Infrastr uktur Pelayanan Dasar	-	-	40.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar di kabupaten/kota														
		jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pembersihan unsur pencemar dengan dampak di kabupaten/kota				1 dokumen Kegiatan	41.746.750,00	Kab. Nunukan, Nunukan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Percepatan Pembangu nan Infrastr uktur Pelayanan Dasar	-		40.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
4,	**PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)**						**8.343.000.186,84**						**-**	**8.296.396.708,84**	
	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	-	-			-	8.343.000.186,84			-	Percepatan Pembangu nan Infrastr uktur Pelayanan Dasar	-	-	8.296.396.708,84	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)														
		Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota				110 Ha	5.426.869.028,84	Kab. Nunukan, Nunukan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Percepatan Pembangu nan Infrastr uktur Pelayanan Dasar	-		5.426.869.028,84	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati														
		Jumlah Orang yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati				20 Orang	50.000.000,00	Kab. Nunukan, Nunukan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Percepatan Pembangu nan Infrastr uktur Pelayanan Dasar	-		50.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati														
		Jumlah Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati yang Dikelola				29 Unit	2.119.527.680,00	Kab. Nunukan, Nunukan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Percepatan Pembangu nan Infrastr uktur Pelayanan Dasar	-		2.119.527.680,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan														
		Unit Taman Kehati Di Luar Kawasan Hutan yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota				3 Ha Unit	746.603.478,00	Kab. Nunukan, Nunukan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Percepatan Pembangu nan Infrastr uktur Pelayanan Dasar	-		700.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
5,	**PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)**						**19.408.000,00**						**-**	**19.196.000,00**	

	Penyimpanan sementara Limbah B3	-	-			-	19.408.000,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Percepatan Pembangunan Infrastruktur Pelayanan Dasar	Terkendalinya Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup	-	19.196.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	Fasilitasi Pemenuhan Rincian Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3 untuk di integrasikan dengan persetujuan lingkungan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission)														
		Jumlah Fasilitasi Pemenuhan Rincian Teknis untuk di Integrasikan dengan persetujuan lingkungan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission)				1 Dokumen	19.408.000,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Percepatan Pembangunan Infrastruktur Pelayanan Dasar	Terkendalinya Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup		19.196.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	0,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Percepatan Pembangunan Infrastruktur Pelayanan Dasar	Terkendalinya Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup	-	0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan														

		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi & Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan yang Bukan Menjadi Kewenangan Pemda Kabupaten/Kota serta Pelaksanaan Pengumpulan dan Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Sesuai dengan Kewenangannya				0 Dokumen	0,00	Kab. Nunukan, Nunukan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Percepatan Pembangunan Infrastr uktur Pelayanan Dasar	Terkendalinya Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup		0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
6,	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)**						**296.803.530,00**						**-**	**300.820.250,90**	
	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	296.803.530,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Percepatan Pembangunan Infrastr uktur Pelayanan Dasar	Terkendalinya Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup	-	300.820.250,90	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH														
		Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan				12 Dokumen	48.711.440,00	Kab. Nunukan, Nunukan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Percepatan Pembangunan Infrastr uktur Pelayanan Dasar	Terkendalinya Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup		50.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup														

		Jumlah PPLHD yang ditingkatkan kapasitasnya				3 Orang	49.338.000,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Percepatan Pembangunan Infrastr uktur Pelayanan Dasar	Terkendalinya Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup		50.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup														
		Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi				17 Usaha/Kegiatan	198.754.090,00	Kab. Nunukan, Nunukan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Percepatan Pembangunan Infrastr uktur Pelayanan Dasar	Terkendalinya Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup		200.820.250,90	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
7,	**PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH**						**51.900.720,00**						**-**	**54.790.166,05**	
	Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH	-	-			-	51.900.720,00			-	Percepatan Pembangunan Infrastr uktur Pelayanan Dasar	-	-	54.790.166,05	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data, dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH														
		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH				1 Dokumen	51.900.720,00	Kab. Nunukan, Nunukan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Percepatan Pembangunan Infrastr uktur Pelayanan Dasar	-		54.790.166,05	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
8,	**PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT**						**54.031.020,00**						**-**	**56.790.166,05**	

	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	54.031.020,00			-	Percepatan Pembangu nan Infrastr uktur Pelayanan Dasar	-	-	56.790.166,05	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup														
		Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan				6 Dokumen	27.997.000,00	Kab. Nunukan, Nunukan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Percepatan Pembangu nan Infrastr uktur Pelayanan Dasar	-		28.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup														
		Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan yang terlibat				30 Orang	26.034.020,00	Kab. Nunukan, Nunukan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Percepatan Pembangu nan Infrastr uktur Pelayanan Dasar	-		28.790.166,05	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
9,	**PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT**						**62.822.260,00**						**-**	**74.790.320,68**	
	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	62.822.260,00			-	Percepatan Pembangu nan Infrastr uktur Pelayanan Dasar	-	-	74.790.320,68	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup														
		Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantrophi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH				7 Entitas	62.822.260,00	Kab. Nunukan, Nunukan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Percepatan Pembangu nan Infrastr uktur Pelayanan Dasar	-		74.790.320,68	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
10,	**PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP**						**96.790.700,00**						**-**	**90.000.000,00**	
	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	*Jumlah pengaduan lingkungan hidup yang diselesaikan*	-			3 Pengaduan	96.790.700,00			Memperkua t penyelara san kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta penin gkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Percepatan Pembangu nan Infrastr uktur Pelayanan Dasar	Terkendalinya Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup	-	90.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	Penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang ditangani yang menjadi kewenangan kabupaten/kota														

		Jumlah sengketa lingkungan hidup yang ditangani yang menjadi kewenangan kabupaten/kota				0 Perkara	0,00	Kab. Nunukan, Nunukan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Percepatan Pembangunan Infrastruktur Pelayanan Dasar	Terkendalinya Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup		0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota														
		Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/dikelola				3 Pengaduan	49.809.150,00	Kab. Nunukan, Nunukan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Percepatan Pembangunan Infrastruktur Pelayanan Dasar	Terkendalinya Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup		40.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	Penerapan sanksi administrasi yang menjadi kewenangan kabupaten/kota														
		Jumlah penerapan sanksi administratif yang dikenakan kepada penanggung jawab usaha/kegiatan yang tidak taat dan menjadi kewenangan kabupaten/kota				2 Sanksi	46.981.550,00	Kab. Nunukan, Nunukan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Percepatan Pembangunan Infrastruktur Pelayanan Dasar	Terkendalinya Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup		50.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
11,	**PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN**						**8.784.501.910,00**						**-**	**8.784.501.910,00**	
	Pengelolaan Sampah	-	-			-	8.784.501.910,00			-	Percepatan Pembangunan Infrastruktur Pelayanan Dasar	-	-	8.784.501.910,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan														

		Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat				4 Kelompok	8.364.785,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Percepatan Pembangu nan Infrastr uktur Pelayanan Dasar	-		8.364.785,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota														
		Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir				1 unit Unit	9.263.100,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Percepatan Pembangu nan Infrastr uktur Pelayanan Dasar	-		9.263.100,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	Penanganan sampah melalui pengangkutan														
		Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pengangkutan				6811 Ton	7.653.678.880,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Percepatan Pembangu nan Infrastr uktur Pelayanan Dasar	-		7.653.678.880,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	Penanganan sampah melalui pengumpulan sampah														
		Persentase luas layanan pengumpulan sampah				81 Persentase	282.600.000,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Percepatan Pembangu nan Infrastr uktur Pelayanan Dasar	-		282.600.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan														
		Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan				6981 Ton	234.018.300,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Percepatan Pembangu nan Infrastr uktur Pelayanan Dasar	-		234.018.300,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional														
		jumlah sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPSTkabupaten/kota atau TPA/TPST Regional				6981 Ton	390.352.000,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Percepatan Pembangu nan Infrastr uktur Pelayanan Dasar	-		390.352.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	Penyusunan Kebijakan Kerja Sama Pengelolaan Persampahan														
		Jumlah dokumen kerja sama / kemitraan dalam melakukan pengelolaan sampah				2 Dokumen	41.853.875,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Percepatan Pembangu nan Infrastr uktur Pelayanan Dasar	-		41.853.875,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	Pengurangan sampah melalui pemanfaatan kembali sampah														
		Jumlah sampah yang dimanfaatkan kembali				2164,11 Ton	164.370.970,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Percepatan Pembangu nan Infrastr uktur Pelayanan Dasar	-		164.370.970,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
							29.478.804.492,84							**32.146.041.937,90**	

BAB IV

PENUTUP

Penyusunan Rencana Kinerja (Renja) Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Nunukan Tahun 2026 ini mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan RencanaPembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah yang merupakan dokumen perencanaan untuk periode satu tahun anggaran.

Dalam prosesnya, Rencana Kinerja (RENJA) Tahun Anggaran 2026 Dinas Lingkungan Hidup mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan akhir RKPD, Rencana Strategis (RENSTRA), serta mempertimbangkan isu strategis lingkungan hidup yang mengemuka dan target pencapaian Jakstrada Kabupaten Nunukan tahun 2026

Renja DLH ini merupakan masukan utama untuk penetapan rencana kegiatan yang dibiayai dari APBD Kabupaten Nunukan, untuk Tahun Anggaran 2026. Semoga Rencana Kerja ini dapat direalisasikan oleh seluruh jajaran Dinas Lingkungan Hidup

Nunukan, Oktober 2025

Kepala Dinas Lingkungan Hidup



dr. MEINSTAR TOLOLIU,M.M
NIP. 19661008 199903 1 007